



Co-funded by the
European Union



CLIMATE
RESILIENT
AND INCLUSIVE
CITIES



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



United Cities and Local Governments
Asia-Pacific

CLIMATE CHANGE MEDIA MONITORING

DECEMBER 2021



#CLIMATEFINANCING

Sri Mulyani Tantang Pertamina Tandai Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim

Menteri Keuangan Sri Mulyani menantang PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penandaan anggaran (budget tagging) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ia menilai sebagai perusahaan negara terbesar bidang energi seharusnya Pertamina melakukan hal tersebut. Ia menantang perseroan bisa melakukan pendanaan anggaran untuk biaya operasional, biaya investasi, dan pengeluaran modal yang terkait dengan perubahan iklim. Tantangan ini diberikan lantaran Pertamina dinilai memiliki peran penting untuk mendorong transisi energi selain dari pemerintah. Pasalnya, pemerintah hanya mampu berkontribusi sebesar 23 persen dari total belanja untuk energi rendah emisi.

Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211207110129-532-730843/sri-mulyani-tantang-pertamina-tandai-anggaran-mitigasi-perubahan-iklim>

BKF: Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim 2018-2020 Capai Rp 307,94 Triliun

Sekretariat Nasional Designate Authority Green Climate Fund Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Noor Syaifudin mengatakan, rata-rata anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia sejak 2018 hingga 2020 mencapai 4,3% per tahun atau sekitar Rp 102,65 triliun, sehingga kalau ditotal (2018-2020) mencapai Rp 307,94 triliun. Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan pendanaan untuk memitigasi perubahan iklim melalui climate budget tagging. Anggaran perubahan iklim di pemerintah pusat lebih banyak digunakan untuk kegiatan mitigasi, di 2018 sebesar 66,2% dan 55,6% pada 2019.

Sumber:

<https://investor.id/business/273505/bkf-anggaran-mitigasi-perubahan-iklim-20182020-capai-rp-30794-triliun>

Kemenkeu Akan Beri Insentif Perusahaan Atasi Perubahan Iklim

Pemerintah telah menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan yang melakukan aksi-aksi perubahan iklim. Saat ini pemerintah tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan risiko dan investasi transisi energi hijau tergolong besar. Begitu juga dengan proyek-proyek adaptasi perubahan iklim. Namun, green energy-green Industry bisa membuka 23 juta lapangan kerja baru. Ini sesuai dengan bonus demografi di Indonesia, namun dibutuhkan juga upaya untuk memperbarui dan meningkatkan keahlian pekerja Indonesia untuk mengisi sektor ini.

Sumber:

<https://www.republika.co.id/berita/r3ksk0383/kemenkeu-akan-beri-insentif-perusahaan-atasi-perubahan-iklim>

OJK Susun Taksonomi Hijau, Apa Itu dan Mengapa Perlu?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama berbagai kementerian/lembaga sedang menyusun Taksonomi Hijau sebagai upaya mempercepat program pembiayaan dengan prinsip berkelanjutan di sektor jasa keuangan. Taksonomi Hijau dapat dijadikan acuan dalam menyamakan bahasa tentang kegiatan usaha atau produk dan jasa yang tergolong hijau. Kegiatan usaha hijau adalah usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi, serta adaptasi perubahan iklim yang telah sejalan dengan definisi yang berlaku secara internasional.

Sumber:

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/867317/ojk-susun-taksonomi-hijau-apa-itu-dan-mengapa-perlu>

#ENERGYTRANSITION

Penambahan Pembangkit Tenaga Biogas di Riau Diyakini Tangani Perubahan Iklim Dunia

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendukung komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini ditunjukkan dengan peresmian tiga pembangkit tenaga biogas (PTBg) milik anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V). Ketiga PTBg ada di Sungai Pagar, PTBg Sei Tapung di Kabupaten Kampar serta PTBg Lubuk Dalam di Kabupaten Siak. Adanya PTBg ini merupakan kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). PTPN V merupakan perusahaan perkebunan milik negara terbesar yang mengelola pembangkit biogas dengan memanfaatkan gas metana dari limbah cair kelapa sawit atau *palm oil mill effluent* (POME). Keberadaan PTBg ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam melaksanakan dekarbonisasi menuju Indonesia Net Zero Emissions pada 2060 mendatang.

Sumber:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211124/44/1470069/sri-mulyani-susun-kerangka-fiskal-perubahan-iklim-ini-bocorannya>

Pemerintah Diminta Segera Lakukan Aksi Nyata Komitmen Penanganan Perubahan Iklim

Pemerintah dituntut melakukan aksi nyata untuk mewujudkan penanganan perubahan iklim seperti janji Presiden Joko Widodo dalam KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26. Salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang mendesak adalah transisi dari energi kotor ke energi hijau. Saat ini, batubara masih merupakan sumber utama energi listrik. Indonesia telah memiliki rencana lanjutan untuk penutupan awal beberapa pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU). Tiga hal utama yang bisa pemerintah Indonesia lakukan untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, yaitu mempersiapkan dini pembangkit batubara, meningkatkan proyek-proyek energi terbarukan, dan membantu PLN dalam hal lelang dan pengadaan energi terbarukan.

Sumber:

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-diminta-segera-lakukan-aksi-nyata-komitmen-penanganan-perubahan-iklim>

Rekam Jejak Darmawan Prasodjo Ahli Perubahan Iklim dan EBT yang Kini Menjabat Dirut PLN

Rapat Umum Pemegang Saham PLN telah menetapkan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Zulkifli Zaini. Direktur PLN yang baru ini diharapkan dapat membuat terobosan untuk mempercepat transisi energi. Darmawan Prasodjo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN, merupakan ahli energi dan kelistrikan yang telah berpengalaman puluhan tahun sejak masa kuliahnya dan berlanjut ke karier profesionalnya. Darmawan menemuh Post Doctoral di Nicholas Institute Duke University, Amerika Serikat pada bidang energi dan lingkungan dengan fokus pada perubahan iklim, energi baru terbarukan, transisi energi dan international climate agreement.

Sumber:

<https://bali.tribunnews.com/2021/12/07/rekam-jejak-darmawan-prasodjo-ahli-perubahan-iklim-dan-ebt-yang-kini-menjabat-dirut-pln>



#EXTREMEWEATHER

BMKG Nilai Perubahan Iklim Picu Badai Siklon Tropis di Indonesia

Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ardhasena Sopaheluwakan menyatakan satu-satunya indikator gletser di Indonesia, yakni Puncak Jaya wijaya, Papua pasti akan hilang dalam beberapa tahun. Hal itu dipicu karena pemanasan global atau perubahan iklim. Perubahan iklim juga mengakibatkan badai siklon tropis meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Seperti pada badai tropis cempaka 2017 dan badai tropis seroja 2021. Fenomena ini jarang terjadi namun berdampak langsung di wilayah Indonesia.

Sumber:

<https://nasional.tempo.co/read/1537230/bmkg-nilai-perubahan-iklim-picu-badai-siklon-tropis-di-indonesia>

Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Fenomena Cuaca Ekstrem

Sejak awal era industri, emisi yang dihasilkan pembakaran bahan bakar fosil telah menjebak panas di atmosfer. Hal ini mengakibatkan rata-rata suhu di Bumi meningkat sebesar 1,2° Celcius. Jika pengurangan emisi global tak kunjung direalisasikan, siklus ini akan terus berulang. Kontribusi perubahan iklim terhadap cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan bumi adalah: gelombang panas yang makin lama, kekeringan yang memburuk, frekuensi kebakaran meningkat, curah hujan lebih ekstrem.

Sumber:

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/02/073100523/pengaruh-perubahan-iklim-terhadap-fenomena-cuaca-ekstrem?page=all>



Perubahan iklim: Suhu Tertinggi Arktika di Kawasan Kutub Utara Lebih Panas dari Jakarta dan Surabaya

Suhu tertinggi Arktika di kawasan Kutub Utara yang mencapai 38 derajat Celsius telah memecahkan rekor sekaligus menggaungkan "bel peringatan" mengenai perubahan iklim Bumi. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memverifikasi rekor ini dengan merujuk pada catatan suhu di Kota Verkhoyansk, Siberia, Rusia, pada 20 Juni 2020. Catatan suhu itu 18 derajat Celsius lebih tinggi dari rata-rata temperatur maksimum di kawasan tersebut pada periode Juni. WMO, yang bernaung di bawah PBB, mengatakan panas ekstrem ini "lebih pas dengan kawasan Mediterania ketimbang Arktika". Ini adalah pertama kali organisasi itu memasukkan kawasan Lingkar Arktika dalam arsip laporan cuaca ekstrem.

Sumber:

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59662598>

#PRIVATESECTOR

Pemerintah Ajak Swasta Kembangkan Skema Carbon Pricing

Peran dan komitmen pelaku usaha diharapkan menjadi pendorong untuk menerapkan berbagai model bisnis berkelanjutan dan *green investment*, serta mengembangkan skema *carbon pricing* yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mempercepat transisi Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selain itu, swasta juga dapat berperan dalam pengembangan solusi dan inovasi teknologi, Ada beberapa hal yang ingin didorong oleh pemerintah. Dimulai dari ekosistem mobil listrik, kemudian pembangunan PLTS terbesar di Asia Tenggara, meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan, meningkatkan industri berbasis energi bersih, serta meningkatkan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang terpusat di Kalimantan Utara.

Sumber:

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-ajak-swasta-kembangkan-skema-carbon-pricing>

Upaya Swasta Dukung Indonesia Gapai Net Zero Emission

Pemerintah memastikan target Net Zero Emissions di tahun 2060 akan terpenuhi jika kolaborasi dengan swasta berjalan dengan baik. Swasta berperan penting dalam memerangi laju perubahan iklim global, terutama soal target penurunan emisi gas rumah kaca. Melalui capaian dan implementasi Net Zero Emissions yang konsisten dilakukan, nantinya akan muncul kesempatan *green jobs* dan peluang investasi baik itu dalam bisnis hijau pada energi terbarukan maupun ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular mampu meningkatkan PDB pada kisaran Rp 593-Rp638 triliun di tahun 2030. Sementara di bidang sosial, akan muncul 4,4 juta lapangan kerja hijau. Untuk investasi energi terbarukan itu sekitar Rp4,8 triliun sedangkan di ekonomi sirkular Rp308 triliun. Indonesia butuh rata-rata 1 triliun USD untuk tahun 2021-2060 dan biaya-biaya tambahan 3-5 persen PDB di tahun berjalan, sehingga butuh investasi dan kerja sama dari sektor swasta.

Sumber:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/9/1478077/upaya-swasta-dukung-indonesia-gapai-net-zero-emission>

